

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah salah satu dari seluruh dinas sosial- dinas sosial yang merupakan dinas teknis daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dinas Sosial Jawa Barat merupakan dinas teknis daerah yang bertanggung jawab atas pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan perwakilan dari Kementerian Sosial RI di wilayah Provinsi Jawa Barat secara fungsional. Pembentukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai balai dan sub unit pelaksanaan teknis dinas telah diatur pada Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 68 tahun 2009. Selain itu keberadaan kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat juga telah dicantumkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 dan Nomor 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.

1. Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan operasional bidang kesejahteraan sosial.
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang kesejahteraan sosial.
- c. Pembinaan dan fasilitas pelaksanaan tugas tugas bidang kesejahteraan sosial meliputi program, pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pengembangan sosial, pemulihan sosial, bantuan dan perlindungan sosial serta UPTD.
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas Sosial

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dinas teknis daerah di Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memiliki visi dan misi yaitu:

- a. Visi:
Menjadi Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang prima di Jawa Barat
- b. Misi:

- 1) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelayanan kesejahteraan sosial
- 2) Meningkatkan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 3) Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan serta kesetiakawanan sosial
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan pelayanan PSKS melalui penguatan jaringan kerja.

3. **Informasi Lembaga**

Nama Lembaga: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Alamat: Jl. Jend. H. Amir Machmud No.331, Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40522

Telepon/Web: (022) 6643149/humas.jabarprov.go.id

Jam Operasional: 08.00- 16.00 WIB

4. **Struktur Organisasi**

Berikut ini merupakan struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dimana Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat saat ini adalah bapak Dodo Suhendar lalu diikuti oleh Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan dan Aset, Kepegawaian dan Umum, Serta Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, dan Pemberdayaan Sosial yang membawahi kasie-kasie di masing-masing bagian.



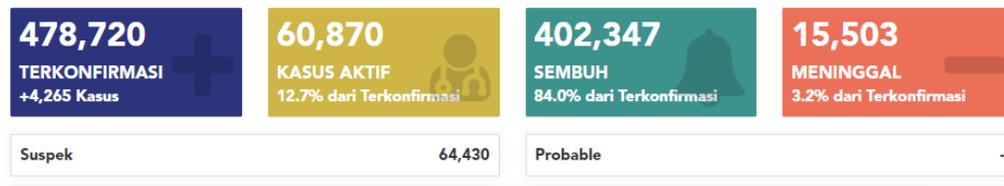
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinsos Jabar

Sumber: <https://dinsos.jabarprov.go.id/> (diakses pada tanggal 22 November 2020 pukul 21.30)

1.2 Latar Belakang

Semenjak awal sekali diberitakan di Kota Wuhan, Cina, pada akhir tahun 2019, virus corona terus tersebar ke segala penjuru dunia diantaranya Indonesia, yang kemudian menjadi pandemi dengan nama Covid-19 (Corona Virus Disease-2019); virus corona kian menyebar dan membuat khawatir karena penularannya yang sangat cepat dengan gejala yang sulit dikenali karena sangat mirip dengan gejala influenza; sampai saat ini, obat dan vaksin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus ini belum ditemukan.

Penyebaran virus corona khususnya di Indonesia kian hari kian bertambah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1; Menurut data yang ditampilkan pada *website* Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Indonesia yaitu covid19.go.id, terhitung tanggal 19 November 2020 di Indonesia sudah terdapat 478.720 kasus terkonfirmasi.



Gambar 1. 2 Data Kasus Covid-19 di Indonesia

Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> (diakses pada tanggal 19 November 2020 pukul 08.15)

Wabah Covid-19 ini telah menimbulkan banyak sekali dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai aspek; mulai dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan; Hal ini membuat pemerintah mengerahkan beberapa strategi untuk mengurangi akibat serta dampak yang muncul dari pandemi ini.

Bersumber pada kabar berita yang diterbitkan oleh web formal Sekretariat Kabinet Republik Indonesia ialah setkab. go.id, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhajir Effendy, pada siaran pers yang dilakukan pada hari Jumat, 8 Mei 2020 mengatakan bahwa:

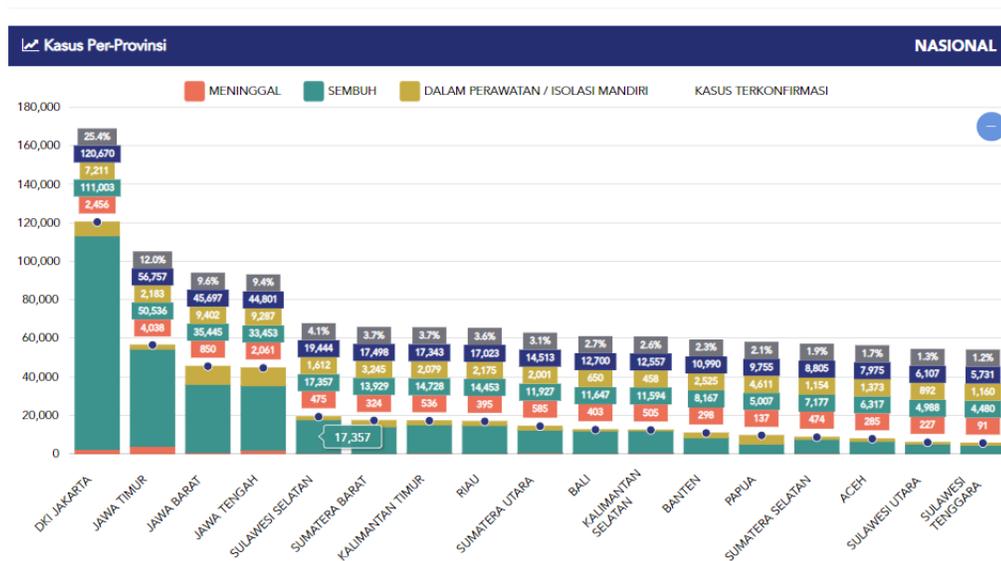
“Untuk menanggulangi dampak negatif yang disebabkan oleh wabah Covid-19 ini pemerintah Indonesia telah menerapkan tiga strategi yaitu penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ketahanan ekonomi. strategi jaring pengaman sosial akan menjadi ujung tombak dari ketiga strategi yang diterapkan; Strategi ini menjadi strategi yang diutamakan dalam penanganan Covid-19.” (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020)

Seperti yang telah dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bahwa yang menjadi ujung tombak dari ketiga strategi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini adalah poin kedua, dimana Kementerian Sosial mendapat mandat menjadi Lembaga Pemerintahan yang paling bertanggung jawab atas penyaluran bantuan-bantuan sosial yang kemudian diserahkan kepada warga terdampak Covid-19 yang ada di Indonesia.

Dalam melaksanakan penyaluran bantuan-bantuan sosial yang kemudian diserahkan kepada warga terdampak Covid-19 yang ada di Indonesia, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan dinas-dinas sosial provinsi yang ada di semua provinsi yang

terdapat di Indonesia; Dari seluruh Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan dinas sosial yang paling banyak menyalurkan bantuan- bantuan tersebut untuk warga terdampak Covid-19.

Hal ini dikarenakan menurut data yang dicantumkan pada website covid19.go.id pada gambar 1.2, Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam lima Provinsi yang memiliki kasus penularan Covid-19 terbanyak di Indonesia dan berada pada urutan ketiga dibawah Provinsi DKI Jakarta serta Provinsi Jawa Timur.



Gambar 1. 3 Peta Sebaran Kasus Covid-19 Per-Provinsi

Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> (diakses pada tanggal 19 November 2020 pukul 08.43)

Selanjutnya diantara lima Provinsi yang memiliki kasus penularan Covid-19 terbanyak di Indonesia, Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling banyak; Hal ini sesuai dengan data pada berita yang ditampilkan pada website resmi Kementerian Dalam Negeri per tanggal 30 Juni 2020 yang menyatakan bahwa:

“Adapun provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara dengan 663.696 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat, yakni 46.092.205 jiwa.” (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,2020).

Tingginya jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap risiko jumlah masyarakat terdampak Covid-19 yang harus diberi bantuan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; Semakin banyak jumlah penduduknya maka semakin banyak pula kemungkinan masyarakat yang akan terdampak Covid-19 baik dari segi kesehatan seperti tertular virus, ataupun dari aspek lain seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan; Misalnya kekurangan kebutuhan pokok untuk melanjutkan hidup, banyak warga terkena PHK, dan kehilangan penghasilan.

Untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial kepada warga yang terdampak Covid-19, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berkoordinasi langsung dengan 27 dinas sosial-dinas sosial yang terdapat di kabupaten/ kota di Jawa Barat; Dinas Sosial Kabupaten/Kota tersebut yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Pangandaran, serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Cimahi, Depok, Tasikmalaya, dan Banjar.

Pembagian bansos untuk warga terdampak Covid-19 ini adalah hal yang baru ada atau perbaharuan dari yang ada karena sedang berlangsungnya pandemi Covid-19 hingga kini, sehingga demi kelancaran kegiatan penyaluran bantuan sosial tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan sosialisasi kepada Dinas Sosial Kota/Kabupaten yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi dalam proses penyaluran bantuan sosial.

Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu penyuluh sosial dan anggota tim sosialisasi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Rahmi dalam wawancara yang telah dilaksanakan penulis tanggal 2 November 2020. Ia mengatakan bahwa:

“bantuan sosial ini merupakan hal baru yang ada di dinas sosial karena pandemi yang sedang berlangsung saat ini; Selain itu, Bantuan Sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 ini datang secara tiba-tiba dengan jumlah penerima yang sangat banyak; Maka, agar kegiatan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berupaya mengkomunikasikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengenai bantuan sosial tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh dinas sosial kabupaten/kota di Jawa Barat sebelum melakukan kegiatan penyaluran bantuan sosial.” (Hasil wawancara dengan anggota tim sosialisasi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Rahmi tanggal 2 November 2020 di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan demi kelancaran kegiatan penyaluran bantuan sosial yang akan dilakukan; Hal ini dikarenakan dalam sosialisasi tersebut, disampaikan semua hal yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial Covid-19 seperti cara penyalurannya, siapa saja penerima bantuannya, siapa yang memberikan bantuannya, atau pihak mana saja yang bekerja sama dalam kegiatan penyaluran ini.

Sosialisasi ini dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi Zoom; Menurut salah satu artikel dari tirto.id yang berjudul Mengenal Aplikasi Zoom Meeting: Fitur dan cara Menggunakannya, dikatakan bahwa, “Aplikasi Zoom adalah aplikasi berbasis komunikasi dengan memakai fitur video. Aplikasi ini bisa digunakan dalam bermacam fitur seluler, desktop, pc sampai telepon serta sistem ruang.” (Dinda Silviana Dewi, 2020)

Dari penuturan diatas, maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan menggunakan fitur *video conference* yang disediakan oleh aplikasi, dengan menggunakan perangkat yang dimiliki oleh masing-masing partisipan; Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat serta perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Rahmi juga mengatakan, “Sosialisasi secara *online* ini baru dilakukan pertama kali oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 April 2020 karena beberapa pertimbangan diantaranya sedang berlangsungnya pandemi Covid-19 sehingga riskan untuk melangsungkan sosialisasi *offline*, dan kurangnya anggaran untuk melaksanakan sosialisasi *offline* karena seluruh anggaran dialihkan untuk penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dr. H. Dodo Suhendar, MM, dengan pemateri Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang merupakan koordinator penyaluran bantuan sosial Covid-19, serta Penyuluh Sosial Madya.” (Hasil wawancara dengan anggota tim sosialisasi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Rahmi tanggal 2 November 2020 di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)

Media yang dipakai untuk melakukan sosialisasi *online* ini disebut juga webinar; Webinar merupakan penggabungan dari kata web dan seminar yang diartikan sebagai seminar melalui web atau internet (Mansyur,Purnamasari,&Kusuma,2019:27).

Memerhatikan pengertian webinar tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan kegiatan

seminar yang dilakukan secara daring, serta bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai bantuan sosial untuk warga yang terdampak Covid-19 kepada dinas sosial - dinas sosial kabupaten/kota sebelum dilaksanakannya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, menurut Rahmi, sosialisasi ini penting untuk dilakukan karena kegiatan penyaluran bantuan sosial harus dilaksanakan sesegera mungkin sedangkan waktu yang ada tidak banyak, dan *awareness* dinas sosial kabupaten/kota mengenai penyaluran bantuan sosial ini masih sangat rendah. (Hasil wawancara dengan anggota tim sosialisasi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Rahmi tanggal 2 November 2020 di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)

Pernyataan tersebut juga menegaskan, webinar berperan penting sebagai media komunikasi antara Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota pada masa pandemi ini, diharapkan pertukaran informasi antara Dinas Sosial Kabupaten dan Provinsi mengenai kegiatan disalurkan bantuan-bantuan tersebut kepada masyarakat terdampak Covid-19 berjalan maksimal.

Webinar membuat komunikasi dapat dilakukan secara *online* oleh para pesertanya dengan menawarkan keterlibatan yang tinggi dari para pesertanya (Mansyur,Purnamasari,&Kusuma,2019:27); Pernyataan tersebut mempertegas peran webinar sebagai media komunikasi yang digunakan untuk proses penyampaian informasi, sehingga pada webinar para partisipan dapat berkomunikasi secara *online* walaupun berada di tempat dan waktu yang berbeda. Dimana dalam hal ini, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dapat berkomunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai bantuan sosial Covid-19 di tempat yang berbeda-beda.

Pada masa pandemi ini, menyelenggarakan webinar menjadi salah satu media alternatif yang paling umum dipakai untuk melangsungkan kegiatan komunikasi; Hal ini dikarenakan tidak memungkinkannya menyelenggarakan seminar secara *offline* dengan pandemi virus Covid-19 yang belum juga mereda hingga hari ini. Demikian juga Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu organisasi yang menyelenggarakan webinar tersebut.

Selanjutnya, sebagai media baru dalam mensosialisasikan program, belum diketahui apakah proses komunikasi yang terjadi antara pemateri dengan peserta webinar yang mereka lakukan untuk mensosialisasikan bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 tersebut cukup efektif dilakukan;

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, Rahmi mengatakan bahwa:

“dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan webinar sosialisasi tersebut. Diantaranya kendala teknis seperti gangguan koneksi, *noise*, seperti suara tiba-tiba hilang, sulitnya mengumpulkan partisipan webinar, tidak terpantaunya partisipan dalam webinar pada saat webinar sedang berlangsung sehingga tidak dapat dipastikan apakah partisipan menerima informasi dengan baik atau tidak.” (Hasil wawancara dengan anggota tim sosialisasi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Rahmi tanggal 2 November 2020 di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)

Maka dari pernyataan mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi antarpersonal yang terjadi antara pemateri dan peserta pada webinar tersebut dalam sosialisasi mengenai bantuan sosial Covid-19 tersebut perlu dievaluasi efektivitasnya.

Dalam mendeskripsikan efektivitas komunikasi antarpersonal dalam webinar tersebut, digunakan teori efektivitas komunikasi antarpersonal menurut Devito (1997: 259-264) yang menyebutkan bahwa “Efektivitas komunikasi antarpersonal dimulai dengan lima hal yang dipertimbangkan yaitu sikap keterbukaan (*openness*), sikap empati (*emphaty*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), serta kesetaraan (*equality*).”

Menurut Devito (2011: 259-264) dalam komunikasi antarpersonal yang efektif, partisipan komunikasi harus memiliki sikap terbuka seperti bisa menerima pendapat serta saran dari lawan bicara, dan bersedia untuk menyampaikan pesan dan informasi pada lawan bicara atau orang lain yang membutuhkannya, selain itu harus juga dapat mengerti dan merasakan keadaan yang dirasakan orang lain, lalu menilai suatu masalah dari sudut pandang yang lain. Lalu, pihak yang berkomunikasi harus berkomitmen untuk saling mendukung dan selalu bersikap positif. Terakhir, efektivitas komunikasi antarpersonal dilihat dari bagaimana kedua belah pihak sama-sama dihargai atau setara.

Keefektifan komunikasi antarpersonal dalam webinar sosialisasi mengenai bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ini menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti; Karena webinar merupakan media baru yang baru digunakan tahun ini oleh dinas sosial untuk menyelenggarakan sosialisasi mengenai bantuan sosial; Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan dinas sosial di Indonesia yang paling banyak menyalurkan bantuan sosial Covid-19 kepada masyarakat sehingga webinar sosialisasi ini menyangkut kepentingan masyarakat yang jumlahnya sangat banyak, maka komunikasi yang dilakukan dalam webinar sosialisasi ini memiliki urgensi yang tinggi yaitu demi kelancaran penyaluran bantuan sosial yang dilakukan di lapangan agar dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan.

Maka pada penelitian ini akan dicari tahu bagaimana keadaan sesungguhnya di lapangan yaitu pada pelaksanaan webinar sosialisasi mengenai bantuan sosial Covid-19 di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengenai bagaimana komunikasi antarpersonal yang efektif pada webinar sebagai media komunikasi dalam sosialisasi tersebut menggunakan lima indikator efektivitas komunikasi antarpersonal menurut Devito.

Berdasarkan uraian diatas, maka ditentukanlah judul skripsi ini yaitu **“Komunikasi Antar Personal Yang Efektif Pada Webinar Sosialisasi Bantuan Sosial Covid-19 di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat”**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari skripsi ini yaitu:

Bagaimana komunikasi antarpersonal dalam webinar efektif mensosialisasikan bantuan sosial Covid-19 di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?

1.4 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, ditentukanlah pertanyaan penelitian pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana sikap keterbukaan antara pemateri dan peserta saat berkomunikasi pada webinar sosialisasi tersebut?

2. Bagaimana sikap empati antara pemateri dan peserta saat berkomunikasi pada webinar sosialisasi tersebut?
3. Bagaimana sikap mendukung antara pemateri dan peserta saat berkomunikasi pada webinar sosialisasi tersebut?
4. Bagaimana sikap positif antara pemateri dan peserta saat berkomunikasi pada webinar sosialisasi tersebut?
5. Bagaimana sikap kesetaraan antara pemateri dan peserta saat berkomunikasi pada webinar sosialisasi tersebut?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi antarpersonal dalam webinar efektif mensosialisasikan bantuan sosial Covid-19 di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

1.6 Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan bisa memberi kegunaan bagi para pembaca baik secara teoretis maupun praktis. Berikut kegunaan teoritis dan praktis yang bisa didapatkan dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Kegunaan teoretis yang bisa didapatkan dari skripsi ini adalah diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan pengalaman dan menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari pada masa perkuliahan.
 - b. Selain itu, dapat juga untuk menambah wawasan serta pemahaman bagi penulis untuk melakukan analisis di ranah komunikasi antarpersonal.
 - c. Sedangkan bagi para pembaca penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian serupa lalu dapat menjadi sarana untuk mengemban pengetahuan di ranah komunikasi khususnya komunikasi antarpersonal.
2. Kegunaan Praktis

Terdapat kegunaan praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini bagi beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Skripsi ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam menggunakan media komunikasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kedepannya. Apakah penggunaan webinar sebagai media komunikasi kelompok ini dapat dilanjutkan atau tidak.

b. Bagi Organisasi atau Perusahaan Lain

Skripsi ini diharapkan untuk dijadikan masukan dan referensi pada perusahaan atau organisasi lainnya yang akan mengimplementasikan webinar sebagai media sosialisasi. Lalu skripsi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih media yang tepat dalam melaksanakan sosialisasi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat umum seperti masyarakat yang akan menyelenggaraan webinar. penelitian ini dapat dijadikan acuan dengan menerapkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar webinar dapat berjalan dengan efektif, serta menerapkan hal-hal apasaja yang harus dilakukan peserta webinar agar mendukung keefektifan sebuah media komunikasi.

1.7 Waktu dan Periode Penelitian

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

Kegiatan Penelitian	Bulan (Tahun 2020-2021)							
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
Pra Penelitian	■							
Penyusunan Proposal		■						
Desk Evaluation			■	■				
Revisi				■				
Mengumpulkan Data				■	■			
Mengolah Data					■			
Menyusun Skripsi						■		
Bimbingan	■	■	■	■	■	■		
Sidang Skripsi							■	■